

Refleksi Akhir Tahun

Menanti Islah, Partai Pecah Kongsi

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

Fragmentasi partai politik di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Justru agak ganjil, bila sebuah partai itu selalu seia sekata sepanjang usianya. Tidak perlu menelusur pada era Orde Lama atau Orde Baru. Pada masa orde reformasi ini saja berkali-kali sudah kehidupan partai politik dilanda konflik internal. PKB pernah memiliki dua ketua umum yakni PKB Batu Tulis (Matori Abdul Djilil) versus PKB Kuningan (Alwi Shihab) itu terjadi tahun 2002. Tak kunjung islah, tahun 2005, PKB kembar bergeser ke Alwi Shihab dan Muhaimin Iskandar.

Geger konflik internal juga melanda PDIP, dengan eksodusnya beberapa pentolan PDIP seperti Roy BB Janis, Haryanto Taslam, Laksamana Sukardi dan kawan-kawan. Konflik ini agak moderat, karena tidak sampai memunculkan dualisme kepemimpinan. Tapi membuat sempalan partai politik baru yang bernama Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Demokrasi Pembaruan.

PPP setali tiga uang. Partai hasil fusi empat partai Islam produk Orde Baru inipun tak pelak mengalami kejadian serupa. Gara-gara Suryadarma Ali, ketua umumnya mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak, ia dimosi DPP, DPD dan DPC. Terselenggaralah Muktamar VIII Surabaya yang menetapkan Romahurmuzy, mantan Sekjen. Kemudian memancing kubu Suryadarma Ali membuat Muktamar tandingan di Jakarta dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umumnya.

Tidak berhenti sampai di situ. Gonjang-ganjing partai politik ibarat pendulum yang terus berayun. Kali ini partai Golkar tidak mau ketinggalan. Terselenggaranya Munas Golkar di Bali yang secara aklamasi menetapkan Aburizal Bakrie, tidak memuaskan kubu Agung Laksono. Kubu yang sejak awal menolak munas tersebut, membuat pula munas tandingan di Ancol. Selain lebih demokratis, munas Ancol juga dinilai lebih menyuarakan aspirasi daerah untuk keluar dari KMP. Munas ini menetapkan Agung Laksono sebagai ketua umumnya.

Deretan fenomena fragmentasi di atas, seolah menunjukkan kepada public betapa merawat perbedaan kepentingan dan orientasi politik bukan persoalan yang mudah. Bahkan bila tidak tertangani secara baik, implikasi lanjutannya bukan saja partai politik itu semakin hancur dan ditinggalkan konstituen, namun juga memandekkan laju arus demokratisasi yang sedang bergulir.

Akar Masalah

Perpecahan partai politik, tentu akan semakin berlarut-larut bila tidak segera dideteksi apa saja yang menjadi akar masalahnya. Hemat saya, paling tidak ada lima factor yang kerap menjadi pemantik perpecahan tersebut. Pertama perbedaan orientasi ideologi partai. Kedua perbedaan orientasi kepentingan politik. Ketiga perbedaan distribusi dan alokasi peran actor. Keempat perbedaan implementasi kebijakan partai dan kelima perbedaan gaya kepemimpinan sang ketua umum.

Bisa jadi, kelima faktor tersebut bertambah atau berkurang. Paling tidak sebagai spektrum untuk melihat persoalan apa yang tengah terjadi di lapangan, sudah cukup. Melacak dimensi historis misalnya, mengapa PPP rentan perpecahan? Selalu yang dihembuskan adalah legasi fusi partai yang tidak kunjung tuntas sejak awal. Integrasi partai-partai berbasis Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) pada waktu itu (1973) bukan inisiatif internal partai tetapi akibat intervensi negara. Aspek historis inilah yang kerap kali menjadi pertautan kompetisi dari unsur mana mereka. Meski sudah lama berlalu, seolah jejak sejarah itu terus digaungkan sebagai pembeda.

Hal yang sama juga ditemukan di tubuh partai Golkar. Sekalipun konsolidasi Golkar relative lebih stabil, ternyata ketika dihadapkan pada kepentingan pragmatis kekuasaan, partai inipun goyah. Partai tidak sekedar dihadapkan pada dualisme kepemimpinan di level nasional, tetapi juga runtuhnya kekuasaan potensial yang massif. Reputasi Golkar betul-betul dipertaruhkan manakala rekonsiliasi melalui perundingan dua kubu tidak membuahkan hasil.

Tuntutan keluar dari KMP oleh kubu Agung Laksono, barangkali tuntutan yang paling sulit dipenuhi kubu ARB yang diwakili oleh Cicip Sutardjo, MS Hidayat, Freddy Istumahena, Azis Syamsuddin, dan Theo Sambuaga, dibandingkan pemilukada langsung, pilpres oleh rakyat dan satu kesepakatan internal. Namun tidak berarti, tidak ada jalan keluar. Perundingan babak selanjutnya di awal tahun 2015, harus menjadi arena pembuktian bahwa mereka sedang berproses kalau politik bukanlah '*zero game arena*'.

Memaksa kubu ARB berunding dengan kubu AL, membuktikan bahwa ARB untuk kesekian kalinya kalah piawai dalam permainan politik cantik pada level internal maupun nasional. Atau dalam bahasa politis, kendatipun terpilih secara aklamasi ia mengalami degradasi aseptabilitas dan legalitas. Poin kemenangan absolute pada Munas Bali, berhasil didelegitimasi oleh forum tandingan lain, yang sejatinya bisa saja diabaikan bila secara konstitusi partai ia tidak bermasalah.

Pada sisi lain, kubu AL juga mampu memainkan demotivasi sebagian DPD dan DPC dalam bentuk penguasaan sekretariat partai di Slipi. Jantung aktivitas keadminitrasian berhasil sepenuhnya dikendalikan. Jika ini berlarut-larut tidak ada kejelasan, maka

pilkada yang akan diusung di beberapa daerah tahun 2015 bakal mandeg dan memunculkan kefrustrasian politisi lokal untuk berkompetisi di pemilukada. Tidak itu saja, kubu AL dengan kekuatan pendukung yang minim di DPR mampu pula menggedor 'comfortable zone' kubu ARB dengan usulan penggantian ketua fraksi DPR dan MPR dari partai Golkar.

Sangat jelas terbaca, bahwa AL lebih menguasai teknik berpolitik dengan pukulan *jab-jab* sebagai pembuka permainan. Bila tidak segera disadari sejak awal, akumulasi *jab* bisa dikunci dengan pukulan *uppercut* yang mematikan. Pada saat itu ARB sudah sempoyongan mempertahankan stamina agar tidak disudahi secara KO (*knock out*).

Mencari Celah

Langkah blunder ARB adalah terlalu obral dengan SK pemecatan. Ia lupa bahwa partai Golkar adalah sebuah arsitektur bangunan yang disangga oleh tujuh pilar utama yang bernama KINO (Kelompok Induk Organisasi) yang terdiri atas KOSGORO, Soksi, MKGR, Organisasi Profesi, HANKAM, GAKARI dan Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971. Merekalah cikal-bakal Golkar pada awal berdirinya. Tanpa ketujuh KINO ini tentu tidak bakal ada partai politik berlambang beringin dalam konstelasi peta politik Indonesia modern.

Jika sekarang partai ini sedang gonjang-ganjing tentu tidak bisa lepas dari konteks historis serta beragam tantangan dinamika kehidupan partai yang berlangsung saat ini. Aspek historis tetap harus menjadi pertimbangan, bahwa sejak awal disain partai ini adalah menguasai pemerintahan demi melaksanakan pembangunan. Segala cara ditempuh oleh Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar semasa Orde Baru, agar melanggengkan Golkar sebagai *the ruling party*.

Fakta ini tidak bisa dinafikan. Maka ketika Orde Reformasi tiba Golkar yang kemudian berganti nama dengan Partai Golkar tetap dan harus menjadi bagian dari pemerintahan. Inilah yang menjadi patron konservatif partai ini. Ketika tiba-tiba, karena salah kalkulasi politik oleh ketua umumnya, dan Golkar diarahkan untuk menjadi partai penyeimbang (baca: oposisi) sebagaimana elite menolak. Ini menyalahi hakekat dan jatidiri Golkar ketika didirikan.

Model kepemimpinan dan orientasi perjuangan yang tidak jelas harus segera dikoreksi. Maka sejatinya, munas Golkar Ancol harus secara jernih dibaca sebagai pelurusan arah dan garis perjuangan partai Golkar itu sendiri. Di sini, sebagian elemen Golkar salah memberi tafsir seolah-olah Munas Ancol sebagai bentuk pembangkangan terhadap hasil Munas Bali. Jika logika berpikirnya diselamkan melalui penjiwaan karakteristik Golkar mula-mula maka semua pihak akan menjadi maklum.

Partai Golkar dan kekuasaan adalah dua elemen yang saling bersebelahan sisi. Maka kunci keberhasilan menyatukan kembali partai ini dalam satu payung besar adalah

kembali menengok dimensi historis dan kejuangan serta cita-cita awal berdirinya organisasi politik ini. Ketika penguasaan sektor ABG (militer, birokrasi dan mesin partai) tidak bisa diandalkan lagi, maka cara yang paling moderat adalah membangun koalisi sehat dan bermartabat dengan siapapun partai yang berkuasa. Jangan kemudian alergi dan membentuk poros oposisional yang pada gilirannya justru menjauhkan partai dari keterlibatan aktif sebagai aktor pembangunan di era reformasi. Partai Golkar dengan politisi yang kenyang pengalaman dan jam terbang yang tidak perlu diragukan, jangan sampai menjatuhkan diri sebagai *follower* tetapi tetap tegak kepala sebagai aktor *trend setter*.

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKK (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**